

**ANALISIS PELAKSANAAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TAHUN 2023
DI KELURAHAN ARDIREJO KECAMATAN PANJI
KABUPATEN SITUBONDO**

Anifah Syintia Susanti¹, Dini Noor Aini², Nina Sa'idah Fitriyah³

¹Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

²Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

³Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email : anifahsyintia02@gmail.com

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Sejak diluncurkan pada tahun 2007, Program Keluarga Harapan (PKH) telah berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan mendorong kemandirian penerima bansos, yang selanjutnya disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berdasarkan fenomena ini penelitian disajikan untuk menjawab dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dalam mengurangi kemiskinan.

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2023 di Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Sementara itu, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam serta studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo terdapat adanya penurunan jumlah Keluarga Penerima Manfaat pada tahun 2023 yang berjumlah 120 orang, 2) faktor pendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu koordinasi antar aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini sudah berjalan dengan baik. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu munculnya rasa ketidakpuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang selalu menggantungkan hidup mereka pada bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

Kata kunci : Analisis, Kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH)

ABSTRACT

The Family Hope Program (PKH) is one of the social protection programs in Indonesia in the form of social assistance. Since its launch in 2007, the Family Hope Program (PKH) has contributed to reducing poverty and encouraging the independence of social assistance recipients, from now on referred to as Beneficiary Families (KPM). Based on this phenomenon, the research is presented to answer and explain how implementing the Family Hope Program (PKH) in Ardirejo Village, Panji District, Situbondo Regency, reduces poverty.

The research aims to analyze the implementation of the Family Hope Program (PKH) and find out the supporting factors and inhibiting factors in implementing the Family Hope Program (PKH) in 2023 in Ardirejo Village, Panji District, Situbondo Regency.

This research was conducted using a qualitative method. The informants were determined using a purpose-selected technique consisting of key informants, main informants, and supporting informants. Meanwhile, data collection was carried out by means of observation, in-depth interviews, and documentation studies.

The results showed that: 1) the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Ardirejo Village, Panji Subdistrict, Situbondo Regency, there was a decrease in the number of Beneficiary Families in 2023, which amounted to 120 people; 2) the supporting factors for the implementation of the Family Hope Program (PKH) are coordination between the actors involved in the implementation of the Family Hope Program (PKH), which has been going well. In comparison, the inhibiting factor is the emergence of dissatisfaction among Beneficiary Families (KPM) who always depend on the social assistance of the Family Hope Program (PKH).

Keywords: Analysis, Poverty, Family Hope Program (PKH)

PENDAHULUAN

Negara yang berada pada proses perkembangan pasti tidak luput dari masalah yang muncul di pemerintahannya, baik itu masalah sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Tidak terkecuali negara kita sendiri yaitu Indonesia. Indonesia merupakan Negara berkembang yang memiliki masalah kemiskinan hingga saat ini. Kemiskinan ini terjadi karena adanya keterbatasan manusia dalam hal memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan pangan, sandang, papan. Awal mula masalah kemiskinan terjadi ketika adanya gejala perekonomian yang disebabkan oleh turunnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing yang terjadi pada tahun 1998 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun drastis.

Permasalahan kemiskinan yang tinggi merupakan penghambat pembangunan, dikarenakan masyarakat tidak memiliki kemampuan dan memiliki banyak kekurangan. Kemiskinan masih sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara, hal ini karena pertumbuhan ekonomi termasuk indikator penting yang digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja suatu perekonomian di suatu negara. Ledakan dari permasalahan kemiskinan akan membahayakan kondisi di suatu negara yang akan menyebabkan suatu krisis sehingga berdampak pada

stabilitas politik. Sejak krisis itu, Indonesia dilanda masalah kemiskinan terparah sepanjang kehidupan. Meskipun hingga tahun 2019 telah mengalami perubahan yang sangat signifikan terhadap angka kemiskinan, namun masih menjadi masalah utama Indonesia terutama dalam pembangunan.

Pembangunan erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat agar tercipta sebuah kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus juga memperhatikan masalah kemiskinan. Karena kemiskinan merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari masalah pemenuhan kebutuhan hidup. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Rendahnya kualitas hidup penduduk miskin berakibat pada rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan sehingga dapat mempengaruhi produktivitas. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar termasuk sandang, pangan, papan ditandai dengan rendahnya kemampuan masyarakat berpendapatan tinggi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan kondisi seperti ini menyebabkan dapat meningkatkannya beban ketergantungan bagi masyarakat. Penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan mencakup mereka yang berpendapatan rendah, tidak berpendapatan rendah tetap atau tidak berpendapatan sama sekali. Dengan demikian, maka pengentasan dan penanggulangan kemiskinan diupayakan berbagai pihak diharapkan dapat mengangkat taraf hidup masyarakat miskin. Tanpa perhatian khusus pemerintah, anak putus sekolah rentan menjadi korban eksploitasi, termasuk perdagangan anak. Bahkan mereka rentan terhadap pelanggaran hukum dari penyalahgunaan obat terlarang sampai dengan kriminalitas. Putus sekolah juga berdampak pada minimnya wawasan atau ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh anak, masa depan anak tidak jelas sehingga menyebabkan pengangguran di masa mendatang.

Dengan demikian, berbagai alokasi anggaran telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk program-program dan kegiatan yang bertujuan menurunkan angka kemiskinan. Tidak hanya berfokus pada masyarakat miskin, pemerintah juga melakukan analisis penyebab terjadinya kemiskinan dan menyelesaikan permasalahan. Salah satunya yang langsung berhubungan dengan kemiskinan adalah program yang dikenal sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) yang berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.

Berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) banyak daerah-daerah yang telah tersentuh oleh program ini, salah satunya adalah di Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Ardirejo ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mengurangi angka kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat yang sangat miskin. Berikut kriteria kemiskinan di Kelurahan Ardirejo disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1 Kriteria Kemiskinan di Kelurahan Ardirejo

No	Keterangan	Jumlah
1.	Tidak Miskin	126 KK
2.	Rentan Miskin	152 KK
3.	Hampir Miskin	309 KK
4.	Miskin	385 KK
5.	Sangat Miskin	16 KK
Total		988 KK

Sumber : Data Kelurahan Ardirejo, tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kriteria kemiskinan di Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo pada tahun 2024 terdiri dari masyarakat tidak miskin, rentan miskin, hampir miskin, miskin, serta sangat miskin.

Dari kriteria kemiskinan di Kelurahan Ardirejo, maka dapat disajikan data jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang berasal dari kriteria miskin dan sangat miskin dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2 Data Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH

No	Tahun	Jumlah KPM PKH
1.	2022	149 Orang
2.	2023	120 Orang
Total		269 Orang

Sumber : Kantor Kelurahan Ardirejo

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo pada tahun 2022 berjumlah 149 orang, sedangkan pada tahun 2023 berjumlah 120 orang. Pada tahun 2023 ini jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang disebabkan karena adanya komponen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dalam bidang kesejahteraan sosial khususnya lanjut usia mulai 60 tahun yang berstatus meninggal dunia, sehingga pemutakhiran data harus dilakukan setiap bulan karena terdapatnya perubahan. Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini yaitu untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih menemui beberapa permasalahan salah satunya yaitu terdapatnya masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan adanya penurunan jumlah penerima PKH di Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Zuriah, 2007:47). Pada jenis penelitian ini, data yang

diperoleh semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak diperlukan untuk mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun implikasi. Moleong (2005:4) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan dengan mengumpulkan data-data, yaitu berupa kata-kata, gambar-gambar, dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan, foto, video, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk memberikan analisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2023 di Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo yang beralamat di Capore, Ardirejo, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68321. Waktu penelitian selama ini dilaksanakan pada bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 selama 2 bulan dengan dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu observasi yang diawali dengan penyusunan proposal dan seminar proposal. Tahapan kedua yaitu melaksanakan tahapan penelitian yang meliputi penggalan data dan analisis data. Tahapan ketiga yang merupakan tahapan terakhir yaitu membuat laporan hasil penelitian dan konsultasi skripsi.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016:224) tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Oleh karena itu, pada teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam suatu penelitian tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti tidak bisa mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari pertama, observasi ialah alat menguji sesuatu fakta yang dikumpulkan untuk diuji kebenarannya. Sugiyono (2013:123) mengutip pendapat Usman dan Purnomo bahwa observasi ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dapat dikontrol keadaannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya). Kedua, wawancara ialah metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan informan secara langsung yang dianggap berkompeten tentang masalah yang diteliti. Sehingga informasi dan data yang didapat dari proses wawancara bisa sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Sugiyono (2013:138) maksud dilakukannya wawancara ialah merekonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan sebagainya. Alat wawancara yang digunakan seperti buku catatan, tape recorder, camera, atau handphone android. Ketiga, dokumentasi catatan atau rekam jejak peristiwa. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, video, dan sebagainya. Peneliti melakukan teknik dokumentasi untuk mencari dan mendapatkan data secara langsung di Kelurahan Ardirejo

Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Keempat, teknik analisis data dalam Sugiyono (2016:244) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola dan memilih data yang penting dan data yang akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2023 di Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo

Analisis pelaksanaan kebijakan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, membuahakan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik. Analisis pelaksanaan kebijakan tidak semata-mata melakukan analisis terhadap data dan informasi, akan tetapi memperhatikan seluruh aspek yang menyangkut proses pembuatan suatu kebijakan mulai dari analisis terhadap masalahnya, pengumpulan informasi, analisis, penentuan alternatif kebijakan, sampai kepada penyampaian alternatif tersebut terhadap para pembuat keputusan.

Dalam menganalisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini menggunakan bentuk analisis retrospektif sebagai penciptaan dan transformasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Analisis pelaksanaan pada Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk bantuan sosial yang diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan sebagai imbalannya RTSM tersebut diwajibkan untuk menyekolahkan anaknya, melakukan pemeriksaan kesehatan termasuk pemeriksaan gizi dan imunisasi balita, serta memeriksakan kandungan ibu hamil. Untuk jangka pendek, bantuan ini akan membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Program bantuan ini memiliki peranan penting dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat miskin khususnya, dengan adanya bantuan sosial dapat menjadi satu-satunya harapan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-sehari.

Program Keluarga Harapan (PKH) salah satu program bantuan pemerintah yang disalurkan kepada wilayah atau daerah khususnya di Kabupaten Situbondo yang salah satunya diterapkan di Kelurahan Ardirejo dengan arahan dari PKH Koordinator Kabupaten yang memiliki beberapa anggota di bawahnya untuk menjalankan tugas sebagai penyalur bantuan yang tersebar kepada setiap wilayah dan daerah Kabupaten Situbondo.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Program Keluarga Harapan (PKH)

Faktor-faktor yang mempengaruhi Program Keluarga Harapan (PKH) terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat antara lain :

a) Faktor Pendukung

1) Komunikasi

Komunikasi yang terjalin dengan baik antara pendamping PKH dan

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk memenuhi syarat wajib bagi masyarakat PKH sebelum memperoleh hak menerima dana sebagai masyarakat PKH di rekeningnya. Dirasakan oleh masyarakat PKH pihak Dinas Sosial sudah melakukan komunikasi dengan KPM PKH sehingga dapat memberikan manfaat bagi para masyarakat penerima bantuan untuk memecahkan persoalan hidup sehari-hari mereka.

Dengan demikian, proses sosialisasi telah dilakukan dengan baik dan benar secara rutin oleh pihak Dinas Sosial dan pendamping PKH mengenai tujuan dari PKH dan informasi mengenai pencairan dana.

Pendamping Sosial juga harus menguasai pesan yang disampaikan sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dapat dibekali dan menimbulkan perubahan. Menyampaikan pesan dengan bahasa yang sederhana termasuk juga komponen keahlian komunikator pendamping sosial sehingga strategi komunikasi yang diterapkan pendamping sosial dengan cara menyampaikan materi dengan bahasa yang sederhana menunjukkan bahwa ada keahlian dan dapat dikatakan memiliki kredibilitas tinggi. Tak hanya komunikasi, tetapi media komunikasi sangat penting dalam berkomunikasi pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH karena dapat terjadinya percepatan dan terjalannya komunikasi efektif yang diikuti dengan perubahan perilaku.

2) Pendampingan yang Maksimal

Adanya pihak pendamping merupakan sarana pendukung bagi KPM PKH. Dengan adanya penyuluhan yang dilakukan oleh pendamping dapat mendorong potensi keahlian KPM PKH bisa dikembangkan. PKH sudah memberikan manfaat bagi penerima untuk mengentaskan kemiskinan. Pendamping PKH akan memberikan pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dalam mengelola bantuan yang diterima, seperti membantu dalam penggunaan kartu PKH, mengarahkan untuk memanfaatkan bantuan dengan bijak, dan memberikan informasi tentang program-program lain yang dapat membantu kesejahteraan keluarga. Pendamping PKH ini akan memberikan pelatihan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam berbagai bidang, seperti keterampilan usaha, pendidikan, kesehatan, dan keuangan yang bertujuan agar keluarga dapat mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri, serta pendamping sosial PKH akan selalu memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memberikan dampak yang positif juga memantau perkembangan keluarga, memberikan saran, dan melaporkan kemajuan kepada pihak yang berwenang.

3) Sumber Keuangan Memadai

Sumber keuangan menjadi sarana pendukung dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH sehingga dapat mendorong terciptanya keselarasan dan ketepatan pendamping PKH terhadap masyarakat penerima bantuan sosial PKH. Besar bantuan PKH berbeda-beda, tergantung pada komposisi dan kondisi keluarga. Bantuan ini diberikan setiap bulan atau setiap tiga bulan, tergantung pada kebijakan pemerintah

daerah setempat. Bantuan ini diberikan dengan syarat, yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu, seperti memastikan anak-anaknya bersekolah dan mendapatkan imunisasi, dan ibu hamil melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Keuangan PKH yang memadai merupakan faktor pendukung dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya program ini juga dapat membantu mengurangi beban ekonomi keluarga miskin dan rentan serta membantu mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

b) Faktor Penghambat

1) Sikap Apatitis

Watak dan juga sikap yang kurang baik atau apatis serta tidak bertanggung jawab dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH atas informasi yang diberikan oleh pendamping PKH. Hal ini menyebabkan tidak tepatnya waktu penyerahan syarat dan ketentuan dari KPM PKH, akibatnya pencairan dana ke rekening KPM PKH tidak tepat waktu. Masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH selalu bersikap tidak puas dengan bantuan yang diterima, masyarakat terlalu menggantungkan hidup dengan bantuan PKH tanpa bekerja sehingga menimbulkan sifat malas karena adanya bantuan.

2) Data Tidak Akurat

Data di lapangan masih ditemukan adanya data KPM PKH yang tidak akurat, dimana penerima PKH tersebut tidak memenuhi kriteria yang berlaku, namun terdaftar pada data sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Hal ini terlihat bahwa ada beberapa penerima yang tidak layak untuk menerima bantuan tersebut namun datanya terdaftar sebagai penerima bantuan. Data yang ditemukan juga adanya ketidakcocokan data KPM PKH karena kurangnya komunikasi antar masyarakat dan pendamping sosial mengenai status masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH masih ada hidup atau tidaknya serta maupun status perpindahan tempat tinggal masyarakat.

3) Kurangnya Fasilitas

Ruangan dan fasilitas untuk pendamping PKH yang terbatas bahkan bisa dikatakan tidak tersedia. Hanya ada tersedia fasilitas untuk Koordinator pendamping PKH. Sedangkan, untuk pertemuan bagi penerima PKH di Kelurahan Ardirejo beserta pendamping PKH masih ditempatkan di rumah-rumah penerima PKH. Ruangan yang kurang luas sehingga membuat masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH saat mengadakan pertemuan jadi berdesak-desakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan peneliti serta uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo sebagai berikut :

1. Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo terdapat adanya penurunan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH pada tahun 2023 yang berjumlah 120 orang sedangkan pada tahun 2022 berjumlah 149 orang.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi koordinasi antar aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Ardirejo sudah baik, sumber daya keuangan yang memadai, dan peran pendamping PKH yang sangat antusias dalam mendukung Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Ardirejo. Sedangkan, faktor penghambatnya yaitu terdapatnya sikap apatis penerima PKH, tidak akuratnya data yang diberikan penerima PKH, serta kurangnya sarana fasilitas seperti ruangan.

REFERENSI

- Bakry, N. M. (2010). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik; Teori Dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita
- Chandler dan Plano. 2004. *Dalam Yeremias T.Keban. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Medi
- Dwijowijoto, Ryant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Dye, Thomas R. (1976). *Policy Analysis*. Alabama: University of Alabama Press
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet
- Faturohman, M. A. 2023. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rengasjajar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor*. Skripsi. Bandar Lampung : Universitas Lampung
- Handayani, Fitria. 2020. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)*. Skripsi. Bengkulu : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
- Harahap, Mutia. 2022. *Analisis Dampak Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan*. Skripsi. Medan : Universitas Medan Area
- Abas, F. R., Abdussamad, Z., Aneta, Y. 2021. *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tilango*. Jurnal Administration and Public Service. Vol. 2 (1) : 41-42
- Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Publik Vol. II, No. 01
- Afandi, I., Warijo. 2015. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan*

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jurnal Administrasi Publik
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang
Program Keluarga Harapan
BPS/Badan Pusat Statistik dan Depsos/Departemen Sosial (2002). *Penduduk Fakir*
Miskin Indonesia 2002. Jakarta: BPS Oscar Levis Kemiskinan
Cekbansos.kemensos.go.id. Sumber: Grid.id Dinas Sosial Kabupaten
Situbondo tahun 2023